



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PANDUAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KELURAHAN
(RPJM) KELURAHAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2018**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan pendek. Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, Top Down dan Bottom Up. Perencanaan pembangunan berbasis bottom up dan partisipatif dimulai dari tingkat kelurahan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan kelurahan lima tahun ke depan diperlukan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan. Dokumen ini juga menjadi acuan masyarakat untuk penentuan prioritas pembangunan sesuai potensi wilayahnya masing-masing. Agar penyusunan dokumen RPJM Kelurahan lebih optimal diperlukan sebuah pedoman pelaksanaan penyusunan RPJM Kelurahan.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan sesuai dengan permasalahan dan potensi masing-masing wilayah serta selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di atasnya. Mengingat kelurahan merupakan bagian dari perangkat kecamatan.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan buku pedoman ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan selama ini.

Yogyakarta, Maret 2018

Penyusun

Bappeda Kota Yogyakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR PELAKSANAAN RPJM KELURAHAN.....	2
C. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM KELURAHAN	3
D. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA.....	4
E. PENGKAJIAN KONDISI KELURAHAN	6
F. STRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KELURAHAN	10

PANDUAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KELURAHAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pemerintah terkait pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasinya (PP Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017), Pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) maupun jangka panjang (20 tahun). Perencanaan tersebut disusun oleh pemerintah bersama para stakeholder (pemangku kepentingan) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan diatas diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Dokumen perencanaan yang disusun tersebut harus memenuhi prinsip dasar perencanaan pembangunan sebagaimana amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yaitu:

1. Perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu dan terintegrasi baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah yang paling bawah yaitu desa maupun kelurahan. Begitu pula dengan unit pemerintah lain yang bersifat horisontal misalnya antar kabupaten/kota. Perencanaan yang bersifat bottom up dan partisipatif dimulai dari tingkat kelurahan

melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Proses musrenbang ini dirancang sederhana dan diharapkan tidak menjadi jeratan administratif bagi pihak kelurahan sehingga bisa berkonsentrasi pada upaya mewujudkan kelurahan yang mandiri. Sampai saat ini pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan belum memiliki pedoman yang berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk perspektif pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hanya diatur mengenai tata cara pengajuan daftar usulan desa pada perencanaan tahunan yang berpedoman pada peraturan menteri mengenai pedoman pembangunan desa (pasal 98 ayat 4). Sedangkan untuk kelurahan belum ada pedoman khusus mengenai tata cara pengajuan daftar usulan ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat memberikan arah supaya dalam melakukan perencanaan tahunan, masyarakat bisa berpikir untuk perencanaan yang berkelanjutan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJM Kelurahan). Dengan adanya RPJM Kelurahan, diharapkan dalam melakukan pengusulan tahunan pada Musrenbang Kelurahan, masyarakat memiliki acuan dalam penentuan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Disamping itu konsisten perencanaan pembangunan Kelurahan selama 5 tahun tetap terjaga.

Dalam rangka mengoptimalkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJM Kelurahan) perlu ada suatu pedoman yang implementatif berupa buku panduan penyusunan RPJM Kelurahan. Buku panduan ini disusun untuk memudahkan perencanaan pembangunan di Kelurahan dan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kelurahan.

B. DASAR PELAKSANAAN RPJM KELURAHAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

C. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM KELURAHAN

Sebagai sebuah dokumen lengkap dan komprehensif milik Kelurahan dan tidak terlepas dari perencanaan tingkat kecamatan, maka dokumen ini selayaknya disusun oleh tim yang memang memahami kondisi daerahnya dengan baik. Oleh karena itu tim seharusnya terdiri dari perwakilan semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan di Kelurahan. Tim penyusun RPJM-Kel terdiri dari:

1. Lurah sebagai pembina
2. Sekretaris lurah selaku ketua
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selaku sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kelurahan, petugas survey pendataan wilayah dan unsur masyarakat lainnya. Tim Penyusun mengikutsertakan perempuan.

Tim Penyusun RPJM-Kelurahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta
2. Pengkajian keadaan kelurahan
3. Penyusunan Rancangan RPJM Kelurahan

D. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA

Tujuan penyelarasan arah kebijakan adalah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Kelurahan. Begitu pula usulan program dan kegiatan yang diusulkan agar selaras dengan tematik pembangunan wilayah Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kota serta mencermati kebijakan dan program pemerintah kota yang akan berpengaruh kepada kelurahan. Tujuan dari analisis ini adalah agar Kelurahan dapat mengintegrasikan kebijakan dan program dari Kota ke dalam Dokumen RPJM-Kelurahan yang sedang disusun.

Terdapat beberapa dokumen pada tingkat Kota yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJM Kelurahan, diantaranya:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan
2. Tematik Pembangunan Wilayah Kecamatan
3. Informasi Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah

Dokumen-dokumen diatas sangat penting untuk menjadi masukan dalam penyusunan RPJM Kelurahan, karena rencana yang ada dalam RPJMD, RTRW, Renstra SKPD maupun rencana pembangunan kelurahan, hampir seluruhnya berlokasi di kelurahan termasuk pembangunan tematik kewilayah kecamatan. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari dokumen ini agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan program yang disusun.

Tabel 1 Tematik Pembangunan Kewilayahan

No	KECAMATAN	TEMATIK PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
1	Danurejan	Mewujudkan Danurejan Menuju Pembangunan Wilayah Berbasis Kampung
2	Wirobrajan	Pembangunan Berbasis Budaya
3	Kraton	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kecamatan Kraton Sebagai Pusat Pariwisata dan Budaya.
4	Gondokusuman	Gondokusuman sebagai kecamatan yang Nyaman Huni dan Berbudaya
5	Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo Ramah Lingkungan yang Bernuansa Budaya
6	Umbulharjo	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Berbasis Lingkungan, Seni, Budaya dan Pariwisata serta Optimalisasi Peran Pemuda
7	Mergangsan	Kecamatan Mergangsan Menuju Pembangunan Berwawasan Gender
8	Ngampilan	Pengembangan Potensi Wilayah Kecamatan Ngampilan Sebagai Kawasan Pendukung Pariwisata Kota Yogyakarta”.
9	Gedongtengen	Mewujudkan Kecamatan Gedongtengen Sebagai Kecamatan Pariwisata, yang Berbasis Budaya, dan Ekonomi Kreatif.
10	Gondomanan	Mewujudkan Generasi Muda yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
11	Mantrijeron	Terwujudnya Kecamatan Mantrijeron Sebagai Kawasan Penunjang Utama Pariwisata Melalui Penguatan Bidang Seni Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Agrowisata Tanaman Obat.
12	Kotagede	Pelayanan Prima, Inklusi dan Berwawasan Lingkungan.
13	Jetis	Mewujudkan Kecamatan Jetis yang Religius dan Berbudaya
14	Pakualaman	Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Menuju Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Dengan Pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan.

Sumber : Buku Panduan Musrenbang Kelurahan di Kota Yogyakarta, 2017

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kota yang akan masuk ke Kelurahan. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kelurahan dan menjadi lampiran hasil pengkajian kondisi kelurahan.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang sudah dilaksanakan di wilayah Tahun 2018

KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Program/kegiatan	Perangkat Daerah Pengelola Program/ Keg	Lokasi Kegiatan (Kelurahan/R W/RT)	Volume	Satuan	Pagu Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Dinas Kesehatan	Kelurahan Muja Muju	1	Posyandu	50.000.000
2	Pembangunan instalsi listrik mikro hidro	Dinas Lingkungan hidup	Kelurahan Muja Muju	1	Unit	125.000.000
3	Dst					

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan nama program/kegiatan dari perangkat daerah yang dilaksanakan di kelurahan bersangkutan. Program dan kegiatan ini dapat dilihat dari Informasi pembangunan (Inmen) masing-masing perangkat daerah.

Kolom (3) diisi dengan nama perangkat daerah yang memiliki program tersebut

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan

Kolom (5) diisi dengan jumlah keluaran dari kegiatan tersebut

Kolom (6) diisi dengan satuan dari keluaran kegiatan tersebut

Kolom (7) diisi dengan pagu anggaran yang diberikan pada program tersebut di kelurahan yang bersangkutan.

E. PENGKAJIAN KONDISI KELURAHAN

Pengkajian kondisi kelurahan dilakukan secara partisipatif melalui rembung desa, diskusi kelompok terbatas (Focus Group Discussion) maupun analisis potensi kelurahan lainnya. Kegiatan pengkajian kondisi kelurahan meliputi dua hal yaitu:

1. Penyelarasan data kelurahan
2. Penggalan gagasan masyarakat

Pengkajian kondisi kelurahan dapat dilakukan secara partisipatif melalui rembung desa, diskusi kelompok terbatas (Focus Group Discussion) maupun analisis potensi Kelurahan lainnya. Berikut penjelasan masing-masing kegiatan pengkajian kondisi kelurahan.

1. Penyelarasan data kelurahan

Penyelarasan data kelurahan merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap keadaan riil kelurahan. Penyelarasan data kelurahan dimulai dengan mengumpulkan data dasar atas kelurahan yang meliputi data atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di kelurahan. Data tersebut selanjutnya dianalisis. Analisis minimal yang dilakukan adalah membandingkan data secara berkala, tahun demi tahun dianalisis perkembangannya dan atau membandingkan antar wilayah, misal antar RW. Melalui analisis ini akan terlihat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya terjadi. Secara umum inilah yang disebut permasalahan di Kelurahan. Permasalahan inilah yang nantinya akan diselesaikan dalam 5 tahun ke depan.

Tabel 3. Daftar Sumber Daya Alam

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lahan Persawahan	158	Ha
2	Sungai	6510	M
3	Dst		

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki kelurahan bersangkutan

Kolom (3) diisi dengan volume dari sumber daya alam tersebut

Kolom (4) diisi dengan satuan dari volume sumber daya alam tersebut.

Tabel 4. Daftar Sumber Daya Manusia

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah penduduk laki-laki	Orang
2	Jumlah penduduk perempuan	Orang
3	Jumlah Lansia	Orang
4	Jumlah miskin	Orang
5	Jumlah difabel	Orang

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan kondisi sumber daya manusia masyarakat yang dimiliki kelurahan bersangkutan. Kondisi sumber daya manusia masyarakat yang dimaksud seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, mata pencaharian masyarakat dan sebagainya.

Kolom (3) diisi dengan jumlah dari sumber daya manusia yang dimiliki

Kolom (4) diisi dengan satuan dari jumlah sumber daya manusia tersebut.

Tabel 5 Daftar Sumber Daya Pembangunan

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	3	(4)
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan (beruas dan tidak beruas)	10	Ruas/km
			Tidak beruas/km
	b. Jembatan	3	unit
	a. Gedung PAUD	2	unit
	b. Gedung TK	3	unit
	c. Gedung SD	2	unit
	d. Gedung SMP		
	e. Perguruan Tinggi		
	f. Gedung SMU		
	g. TBM		
	h. PKBM		
	i. LPK		
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	2	unit
	b. Puskesmas		
	c. Klinik		
	d. Herbal		
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar	1	unit
	b. Toko berjejaring		
	c. Toko non berjejaring		
	d. Hotel		
	e. Bank		
5	Kelompok usaha ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha UPPKS	10	Kelompok
	b. KUBE		
	c. P2WKSS		

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan kondisi sumber daya pembangunan yang dimiliki kelurahan bersangkutan. Kondisi sumber daya pembangunan yang dimaksud seperti aset prasarana umum, aset prasarana pendidikan, aset prasarana kesehatan, aset prasarana ekonomi, kelompok usaha ekonomi produktif dan sebagainya.

Kolom (3) diisi dengan jumlah dari sumber daya pembangunan yang dimiliki
Kolom (4) diisi dengan satuan dari jumlah sumber daya pembangunan tersebut.

Tabel 6a Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gotong Royong	1 kali	Bulan
2	Merti kampung	1 kali	Tahun
3	Pawai Budaya	1 kali	Tahun
4	Komunitas Sungai	2 kelompok	
5	Komunitas Pemuda	1 kelompok	

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang di kelurahan tersebut seperti kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni budaya lainnya.

Kolom (3) diisi dengan jumlah kegiatan itu dilakukan

Kolom (4) diisi dengan satuan berupa bulan atau tahun.

Tabel 6b Daftar Kampung dan Deklarasinya

Kelurahan :

Kecamatan :

No	Nama Kampung	Deklarasi Kampung	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan nama kampung yang dimiliki.

Kolom (3) diisi dengan deklarasi atau kampung yang sudah dibentuk

Kolom (4) diisi dengan misal Kampung KB ada di RW 1 dan 2

Hasil analisis atas data sumber daya kelurahan ini selanjutnya dituangkan dalam format data kelurahan (profil kelurahan) yang menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi umum kelurahan pada dokumen RPJM Kelurahan dalam BAB II.

2. Penggalan Gagasan Masyarakat

Penggalan gagasan masyarakat dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kelurahan dan masalah yang dihadapi kelurahan. Penggalan gagasan ini hendaknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Kelurahan dapat melalui musyawarah tingkat RW, musyawarah kampung atau musyawarah khusus dengan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang terlibat dalam musyawarah ini minimal meliputi delegasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat (karang taruna, kader posyandu, PKK dll), badan keswadayaan masyarakat, perwakilan forum anak atau kelompok anak, kelompok perempuan, majelis taklim, perwakilan masyarakat miskin, kelompok difabel, kelompok profesi (guru, dokter, pengusaha dll), LSM, tokoh pendidikan, kelompok sektoral (kelompok usaha kecil, kelompok buruh gendong, kelompok tukang parkir, PKL dll), pengelola/pendamping Jam Belajar Masyarakat (JBM), Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di kelurahan setempat.

Pengkajian kondisi di Kelurahan meliputi dua kegiatan yakni analisis terhadap data kelurahan dan musyawarah dengan unsur masyarakat. Kedua kegiatan ini menghasilkan tiga informasi penting yakni (1) kondisi terkini di Kelurahan dan (2) permasalahan yang dihadapi kelurahan dan (3) usulan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil pengkajian kelurahan ini minimal keluar dalam dua bentuk data yakni kajian kondisi terkini kelurahan dan usulan kegiatan di Kelurahan. Agar supaya terlihat relevansi usulan kegiatan dengan masalah yang dihadapi maka dalam laporan ini akan lebih baik jika disajikan permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan. Melalui informasi ini maka dengan tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan yang diusulkan memang sesuai dengan permasalahan yang hendak diatasi oleh Kelurahan. Hasil pengkajian kondisi kelurahan dapat disajikan dalam format berikut ini.

Tabel 7 Hasil Pengkajian Kondisi Kelurahan

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Permasalahan	Potensi	Usulan Rencana Kegiatan	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Beberapa lansia masih terlantar	Fasilitator Pendamping Masyarakat	Jaminan hidup bagi lansia terlantar	RW 2	5	M	5.000.000
2	Dst						

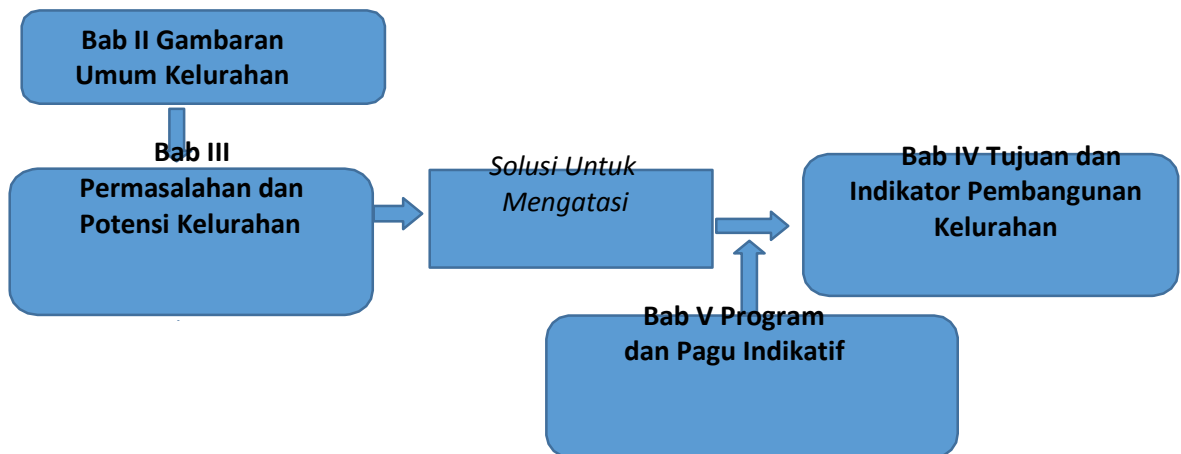
Cara Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan permasalahan yang ada di kelurahan. Permasalahan ini merupakan permasalahan kelurahan yang bersifat makro
- Kolom (3) diisi dengan potensi yang dimiliki oleh kelurahan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- Kolom (4) diisi dengan usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kelurahan
- Kolom (5) diisi lokasi dimana kegiatan tersebut dilakukan
- Kolom (6) diisi dengan volume dari keluaran kegiatan tersebut
- Kolom (7) diisi dengan satuan dari keluaran kegiatan tersebut
- Kolom (8) diisi dengan rencana anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

F. STRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KELURAHAN

Rencana Pembangunan jangka Menengah kelurahan merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif di wilayah kelurahan. Oleh karena itu masing-masing Bab harus saling terkait satu dengan lainnya. Dengan tidak menyertakan BAB I yang berisi pendahuluan dan BAB VI yang berisi Penutup, maka struktur isi dan keterkaitan antar bab dapat dijelaskan dalam diagram berikut.

Diagram 1
Struktur dan Keterkaitan antar Bab dalam RPJMKelurahan



Bab I. PENDAHULUAN

BAB I RPJM Kelurahan berisi 3 aspek berikut:

a. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pentingnya RPJM Kelurahan, proses penyusunan RPJM Kelurahan dan Keterkaitan dengan dokumen lainnya.

b. Dasar Hukum

Memberikan uraian secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Kelurahan baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Kelurahan.

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Kelurahan

d. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN UMUM KELURAHAN

Bab ini memuat informasi mengenai Kondisi Kelurahan secara keseluruhan.

Hal hal yang dapat disajikan dalam BAB ini diantaranya adalah: (1). Kondisi

Umum Kelurahan yang dapat berisi Sejarah Kelurahan, Keadaan Demografi dan Keadaan Sosial serta Keadaan Ekonomi Kelurahan. (2). Kondisi Pemerintahan Kelurahan, yang dapat berisi Pembagian wilayah Kelurahan, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. (3) Sumber Daya Kelurahan, yang berisi potensi sumber daya yang dimiliki oleh kelurahan termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun sumber daya sosial budaya. (4) Kinerja Pelayanan Kelurahan. Bagian ini menunjukkan capaian kinerja kelurahan berdasarkan sasaran/target kinerja sebelumnya.

Agar bab ini menjadi kuat dan dapat menjadi landasan dalam musyawarah Kelurahan maupun identifikasi permasalahan Kelurahan, maka kondisi kelurahan ini dapat disajikan baik dalam format data series maupun data antar wilayah. Penyajian data semacam ini memberikan kemudahan bagi analisis pencermatan terhadap masalah dan potensi kelurahan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN POTENSI KELURAHAN

Pada bagian ini dikemukakan berbagai permasalahan pembangunan kelurahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu bab III ini terdiri dari dua bagian yakni:

1. Analisis Permasalahan Pembangunan Kelurahan
2. Analisis Permasalahan dan Potensi Pembangunan Kelurahan

1. Permasalahan Pembangunan Kelurahan

Secara sederhana permasalahan merupakan gap (kesenjangan) antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya terjadi, atau dalam bahasa sederhana, ada kesenjangan antara aspek normatif dan aspek positif. Permasalahan ini telah dapat diidentifikasi dari kajian atas data dan penggalian aspirasi yang telah dilakukan. Permasalahan publik, seperti permasalahan di Kelurahan tentulah bukan permasalahan yang dapat berdiri sendiri, tetapi pasti saling terkait antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya, untuk itu Tim Penyusun RPJM-Kelurahan harus mampu memilah permasalahan yang ada. Secara umum permasalahan terdiri dari inti masalah, penyebab dan dampak dari masalah itu. Melalui identifikasi seperti ini maka nantinya kebijakan yang disusun akan tepat untuk menyelesaikan masalah bukan hanya menghilangkan gejala masalahnya.

Ada cara mudah untuk mengidentifikasi dan memilah masalah itu yakni dengan terus bertanya. Apa masalahnya? Apa sebabnya berulang dan berseri. Ketika jawaban itu muncul, dari sana dapat disusun hubungan antara masalah yang satu dengan masalah lainnya, sehingga terlihat mana masalah inti, sebab dan dampaknya. Diagram dibawah ini menyajikan salah satu contoh keterkaitan antar masalah dalam suatu Kelurahan

Diagram 2
Analisis Permasalahan Rendahnya Kesejahteraan di Kelurahan
“Sederhana”



Sumber: Data Hipotetis

Diagram diatas menjelaskan bahwa masalah inti atau utama dari Kelurahan ini adalah kurang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Perekonomian yang kurang berkembang ini berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini muncul dari rendahnya kegiatan ekonomi untuk menciptakan nilai tambah, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan ekonominya dari sektor pertanian. Sektor industri pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah pertanian belum dijalankan. Tidak berjalannya kegiatan industri akibat dari minimnya infrastruktur sehingga menyulitkan baik untuk pengadaan input maupun untuk memasarkan output. Kesulitan itu bertambah manakala jaringan pemasaran untuk produk yang hendak dihasilkan belum pasti. Manusia sebagai pelaku utama untuk pengembangan industri itu juga belum memadai, mereka kurang memiliki ketrampilan baik teknis produksi maupun manajemen. Bahan baku untuk diolah memang melimpah tetapi

bahan baku yang baik kurang tersedia karena kebiasaan untuk memetik hasil panen seadanya.

2. Permasalahan dan Potensi Pembangunan Kelurahan

Permasalahan yang ada di Kelurahan harus diatasi dalam waktu 5 tahun ke depan. Sebelum dilakukan penyusunan Draft RPJM Kelurahan telah dilakukan kajian atas kebijakan dan program dari Kabupaten/Kota, kondisi riil Kelurahan dan permasalahan serta usulan program dari masyarakat. Pada subbab ini dapat dijelaskan bagaimana keterkaitan antara permasalahan yang dihadapi dengan berbagai peluang untuk mengatasi masalah itu, apakah itu bersumber dari pemerintah yang lebih tinggi atau dari potensi yang ada di Kelurahan sendiri. Oleh karena itu penjelasan pada sub bab ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini. Dengan menggunakan contoh permasalahan dalam diagram diatas, maka contoh isi tabel permasalahan dan potensi pembangunan kelurahan dapat disajikan seperti dibawah ini.

Tabel 8
Permasalahan Pembangunan Kelurahan dan Potensi untuk Mengatasinya

Permasalahan (1)	Potensi untuk mengatasi (2)
Kurangunya kualitas sumber daya manusia yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian untuk meningkatkan nilai tambah melalui program pelatihan ▣ Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dari Dinas Tenaga Kerja ▣ Program peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM dari Dinas Koperasi ▣ Adanya kemauan yang tinggi dari sebagian masyarakat untuk mengembangkan usaha ▣ Adanya potensi pasar untuk produk olahan dari desa ini ▣ Adanya dukungan penuh dari pemerintah Desa untuk pengembangan ekonomi peningkatan nilai tambah
dst	

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan permasalahan kelurahan yang ada Kolom (2) diisi dengan kemungkinan potensi untuk mengatasi permasalahan yang ada baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun dari dalam Kelurahan

BAB IV. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan, dan indikator pembangunan Kelurahan. Tujuan merupakan keinginan (*intentions or desires*) yang bersifat umum dan mengandung pengharapan, “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan dan pencapaiannya jauh serta tak terbatas. Tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur, namun tujuan akan mengarahkan perumusan program kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan indikator menunjukkan ukuran perubahan yang hendak dicapai contoh jumlah deklarasi kampung yang sudah diintervensi.

Pernyataan tujuan dan indikator pembangunan dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9
Tujuan dan Indikator Tujuan

Nomor	Tujuan	Indikator Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan X berbasis kampung	Jumlah deklarasi kampung yang sudah diintervensi	Intervensi meliputi
	dst		

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai oleh Kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kolom (3) diisi dengan indikator untuk setiap tujuan yang akan dicapai

Kolom (4) diisi dengan keterangan indikator tujuan

BAB V PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF

Bagian ini menjelaskan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif. Strategi masih bersifat umum, untuk itu diperlukan operasionalisasi, baik dari aspek kegiatan maupun rencana pembiayaan. Operasionalisasi dari kebijakan inilah yang disebut sebagai program. Agar dapat dijalankan maka program ini haruslah menyediakan sejumlah anggaran. Oleh karena itu dalam bagian ini akan ditampilkan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif. Program ini merupakan penjabatan dari strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tabel 10 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan RPJM Kelurahan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	Sumber Dana
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan program atau kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kelurahan

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran untuk setiap tujuan an sasaran. Indikator kinerja harus bersifat SMART. Kolom (4) diisi dengan satuan indikator kinerja sasaran

Kolom (5) diisi dengan target program/kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun 1

Kolom (6) diisi dengan rencana anggaran program/kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun 1

Kolom (7) diisi dengan target program/kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun 2

Kolom (8) diisi dengan rencana anggaran program/kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun 2

Kolom (9) diisi dengan target program/kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun 3

Kolom (10) diisi dengan rencana anggaran program/kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun 3

Kolom (11) diisi dengan target program/kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun 4

Kolom (12) diisi dengan rencana anggaran program/kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun 4

Kolom (13) diisi dengan target program/kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun 5

Kolom (14) diisi dengan rencana anggaran program/kegiatan pembangunan kelurahan pada tahun 5

Kolom (15) diisi dengan lokasi program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan

Kolom (16) diisi dengan sumber dana tersebut dari mana

BAB V. PENUTUP

Bab Penutup dapat disajikan ketentuan ketentuan atas RPJM Kelurahan yang telah dibuat.

LAMPIRAN

Pengelompokan Kampung Kota Yogyakarta

<p>KAMPUNG TERTIB</p> <ol style="list-style-type: none">1. Panca tertib2. Bebas Pekat3. Anti Vandalis4. Jogowargo5. Cakruk Multifungsi	<p>KAMPUNG WASIS</p> <ol style="list-style-type: none">8. Gerbang Mas/JBM9. Literasi10. Dongeng11. Cyber12. Saint&Literasi13. Pintar 14. Ramah Anak15. Sadar Gender	<p>BERHATI (BERSIH SEHAT HIJAU)</p> <ol style="list-style-type: none">19. PHBS20. STBM21. Bebas Jentik22. Bebas Asap Rokok23. KTR 24. Bebas Narkoba25. Kespro Remaja26. Hijau 27. Sayur
<p>KAMPUNG TANGGUH SIAGA BENCANA</p> <ol style="list-style-type: none">6. Tangguh bencana	<p>KAMPUNG WISATA DAN BUDAYA</p> <ol style="list-style-type: none">16. Wisata17. Budaya18. Rintisan Kelurahan Budaya	
<ol style="list-style-type: none">7. Siaga Bencana		

Kriteria Kampung (menyusul)

Tahapan Kampung :

1. Rintisan
2. Lanjutan
3. Mandiri